

**PEMBERDAYAAN TKW PURNA MELALUI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN
KERAJINAN TANGAN TENUN SONGKET DI DESA TANJUNG DAYANG
SELATAN, KECAMATAN INDERALAYA SELATAN**

Julius El Roy Marpaung¹, Dyah Hapsari², Vieronica Varbi Sununianti²

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

²Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This paper entitled “Empowerment of Full Migrant Workers Through of Weaving of Songket Weaving Entrepreneurship Program In Tanjung Dayang Selatan Village, Inderalaya Selatan Subdistrict” examines the empowerment process of full migrant workers through entrepreneurship program in songket weaving craft in Tanjung Dayang Selatan village and strategy to develop songket weaving crafts. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Informants in this study were TKW purna, who are currently empowered through songket weaving craft programs to improve the skills and economy of TKW purna. Data collection technique using in-depth interviews, observation and documentation, were analyzed using data reduction analysis techniques, the results of this study looked at the process of empowering full migrant workers through entrepreneurship program is crafting songket weaving after empowerment was carried out. As well as looking at business development strategies and developing songket weaving crafts in the form of improving songket woven quality training, songket fabric marketing and sales, songket weaving partnership and participating in songket exhibitions.

INFORMASI ARTIKEL	
<i>Sejarah Artikel</i>	:
Diterima	: 01 Desember 2019
Disetujui	: 01 Januari 2020
Alamat Email: dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id	
Correspondence Author: Dyah Hapsari	
ISSN (PRINT) : 1412 – 1411	
ISSN (ONLINE) : 2722-7057	
https://doi.org/10.47753/jms.v22i2.55	

Keyword: *Empowerment of Full Migrant Workers, Entrepreneurship, Songket Weaving Craft.*

ABSTRAK

Paper ini berjudul “Pemberdayaan TKW Purna melalui Program Kewirausahaan Kerajinan Tangan Tenun Songket di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Inderalaya Selatan” ini meneliti proses pemberdayaan TKW Purna melalui program kewirausahaan kerajinan tenun songket di Desa Tanjung Dayang Selatan dan strategi pembina usaha mengembangkan kerajinan tenun songket. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah TKW purna yang saat ini telah diberdayakan melalui program kerajinan tenun songket dalam meningkatkan keterampilan dan perekonomian TKW purna. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis reduksi data. Hasil penelitian ini melihat proses pemberdayaan TKW Purna melalui program kewirausahaan kerajinan tenun songket sesudah pemberdayaan dilakukan. Serta melihat strategi pembina usaha dalam mengembangkan kerajinan tenun songket berupa peningkatan pelatihan kualitas tenun songket, pemasaran dan penjualan kain songket, kemitraan tenun songket dan mengikuti pameran kain songket.

Kata kunci: Pemberdayaan TKW, Kewirausahaan, Kerajinan Tenun Songket.

PENDAHULUAN

Perempuan menjadi obyek yang penting untuk dikaji ketika nampak jelas bagaimana pentingnya sebuah pekerjaan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satunya perempuan yang ada di desa terpacu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus mengalami ekspansi. Strategi yang mereka pilih untuk menyelamatkan ekonomi keluarga adalah melakukan migrasi untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, Kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah penduduk sebanyak 430.038 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 217.563 dan perempuan sebanyak 212.475. Selama tahun 2013-2015 Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumsel dengan presentase penduduk miskin sebanyak 54,21 jiwa. Persoalan kemiskinan bukan sekedar besarnya presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah permasalahan meningkatnya kebutuhan yang tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat (BPS Ogan Ilir, 2015). Kemiskinan dapat dikurangi dengan berbagai cara salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah perencanaan pembangunan berupa ketenagakerjaan dalam perencanaan pembangunan, diperlukan data

ketenagakerjaan untuk melihat aspek yang terkait dengan hal tersebut.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan urutan ke-3 pengirim terbanyak tenaga kerja ke luar negeri setelah Palembang dan Ogan Komering Ilir berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir (Disnakertrans Ogan Ilir, 2015). Salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi wadah pengirim pekerja migran adalah wilayah Pedesaan yang ada di Kecamatan Inderalaya Selatan. Presentase perempuan sebagai angkatan kerja antar negara lebih besar dibanding dengan laki-laki. Laporan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, jumlah Tenaga Kerja luar negeri asal kabupaten Ogan Ilir cukup mendominasi penempatan kerja di luar negeri. Akan tetapi dalam setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dari periode 2013 sampai dengan 2015. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tenaga Kerja Indonesia Angkatan Kerja Antar Negara (TKI Akan) menurut Desa di Kecamatan Inderalaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Periode 2013 s.d 2015.

Tabel 1. TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Angkatan Kerja Antar Negara) Desa Urbanisasi di Kecamatan Inderalaya Selatan Periode 2013 s.d. 2015

No	Nama Desa	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	Meranjat I	4	7	11	9	12	21	11	9	20
2	Meranjat II	6	10	16	4	7	11	6	3	9
3	Meranjat III	11	14	25	8	12	20	10	7	17
4	Meranjat Ilir	11	14	25	9	12	21	11	8	19
5	Arisan Gading	2	8	10	3	8	11	12	9	21
6	Tebing Gerinting Selatan	8	11	19	5	12	17	10	7	17
7	Tebing Gerinting Utara	7	10	17	5	10	15	13	10	23
8	Beti	15	17	32	9	6	15	5	7	12
9	Mandi Angin	11	13	24	9	6	15	10	8	18
10	Tanjung Lubuk	15	20	35	9	10	19	11	5	16
11	Tanjung Dayang Utara	24	28	52	15	17	32	17	14	31
12	Tanjung Dayang Selatan	26	27	53	16	19	35	15	13	28
13	Sukaraja Lama	15	17	32	8	11	19	10	7	17
14	Sukaraja Baru	9	13	22	12	15	27	14	6	20
Jumlah		164	209	373	121	157	278	155	113	268

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, 2016

Berdasarkan pada Tabel 1. menunjukkan bahwa angka perempuan yang bekerja sebagai TKW lebih besar dibanding laki-laki yang relatif rendah. Menurut Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, angka tenaga kerja yang bekerja di luar negeri asal Kabupaten Ogan Ilir dari periode 2013-2015, angka perempuan sebagai TKW dalam tahun 2013 sebanyak 209 orang, tahun 2014 sebanyak 157 orang, dan di tahun 2015 sebanyak 113 orang. Sedangkan angka laki-laki sebagai tenaga kerja di luar negeri tidak terlalu mendominasi. Sektor lapangan kerja yang tersedia pada migran sebagian besar merupakan sektor formal atau pekerja di

Industri. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, jumlah penempatan TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Ogan Ilir rata-rata bekerja di kawasan Asia seperti; Malaysia dan Korea. Pekerja di Malaysia tercatat sekitar 200 orang, rata-rata yang bekerja di Malaysia adalah sebagian besar kaum perempuan dan sisanya laki-laki. Sedangkan pekerja di Korea tercatat 100 orang, rata-rata yang bekerja di Korea sebagian besar adalah laki-laki. Durasi lama pekerja di luar negeri masing-masing negara kawasan Asia memiliki perbedaan kontrak kerja, kontrak kerja yang diterima pekerja Malaysia tercatat 1-2 tahun dan kontrak kerja yang diterima pekerja di Korea tercatat 5 tahun lebih lama

daripada di Malaysia. Pada tahun 2015 menjadi tahun pertama TKW asal Ogan Ilir yang pulang ke kampung halaman sebanyak 60 orang dengan alasan TKW pulang karena kehabisan kontrak kerja dan tidak menerima perpanjangan kontrak kerja lagi. Pada tahun 2016 sebanyak 30 orang dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 10 orang laki-laki yang pulang karena kehabisan kontrak kerja atau ada juga pulang karena cuti kerja. Banyaknya kasus TKW dibanding pekerja laki-laki bermasalah yang terjadi, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesiapan mental, pendidikan rendah, kemampuan/skill, hingga kelengkapan dokumen. Permasalahan yang muncul antara lain seperti upah TKW yang diterima di Malaysia terlalu minim, tidak adanya jaminan kesehatan, kontrak kerja yang pendek, permasalahan izin tinggal, hingga deportasi (Samputri & Sakti, 2015).

Pada perkembangannya, dengan harapan adanya perbaikan perekonomian keluarga terutama bagi kaum perempuan yang lebih memilih bekerja sebagai TKW asal Desa Tanjung Dayang Selatan banyak menempati bekerja di wilayah asia pasifik seperti di Malaysia dan Korea. Menurut data, 30 masyarakat asal Tanjung Dayang Selatan tercatat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang masih aktif bekerja berada di luar negeri dan 25 orang sudah kembali ke kampung halaman ataupun desa. TKW asal Desa Tanjung Dayang yang telah pulang mengalami perubahan dalam aktivitas ekonomi dan sosial (Universitas Stekom, 2022). Salah satu perubahan yang terjadi juga adanya perubahan pola hidup. Pola hidup

mantan TKW yang bergeser menjadi hedonis dan konsumtif menyebabkan ketidakberdayaan dalam memanfaatkan remitan untuk suatu hal yang produktif. Pola hidup yang konsumtif juga dapat menyebabkan upah yang telah mereka terima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu lama. Setelah hasil yang diperoleh habis, mantan TKW harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus bertambah. Selain pola hidup yang berubah, interaksi sosial dalam lingkungan pun mengalami perubahan. Perubahan sikap yang sangat terlihat jelas berupa interaksi dengan lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pekerja dari luar negeri memiliki status sosial yang lebih tinggi dengan apa yang telah mereka dapat (Wulandari et al., 2018) Padahal kenyataannya tidak sesuai keinginan, cepat atau lambat mereka akan kembali memiliki kedudukan sama dengan masyarakat desa umumnya. Mantan TKW di Desa Tanjung Dayang Selatan yang telah pulang dari luar negeri sebagian besar tidak mempunyai kegiatan yang produktif. Salah satu kegiatan mantan TKW setelah pulang adalah kembali menjadi ibu rumah tangga.

Dalam keadaan seperti ini, mantan TKW memerlukan perhatian untuk kembali berdaya tanpa kembali lagi ke luar negeri. Selama ini, pelatihan ada hanya sebatas pemberian modal usaha dan pelatihan ekonomi. Padahal untuk menghadapi realitas kehidupan yang lebih sulit membutuhkan adanya bentuk pemberdayaan dari segi sosial seperti pelatihan dan penyuluhan yang menyangkut pengembangan diri, kerjasama,

dan kemampuan untuk berwirausaha (Mochklas & Hariri, 2019). Di Desa Tanjung Dayang Selatan, pemberdayaan dilakukan dengan bantuan berbagai pihak seperti organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah. Bantuan berupa pemberdayaan dengan berbagai pelatihan yang diadakan oleh “*Migrant Care*” dan pemerintah melalui BNP2TKI (*Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*) dan

DISKOPERINDAG (*Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan*) di Kabupaten Ogan Ilir. Pelatihan yang dilaksanakan berupa kursus keahlian melalui program kewirausahaan kerajinan tenun songket. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini data mantan TKW yang mengikuti kewirausahaan kerajinan tangan tenun songket di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Inderalaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir periode 2017.

Tabel 2. Data TKW Purna yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Kerajinan Tangan Tenun Songket di Desa Tanjung Dayang Selatan Kecamatan Inderalaya Selatan Periode 2017

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Tanjung Dayang Utara	2	21
2	Tanjung Dayang Selatan	-	18
TOTAL		2	39

Sumber: BNP2TKI Sumsel (2017)

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa Kewirausahaan Kerajinan Tenun songket yang ditujukan kepada TKW Purna asal Desa Tanjung Dayang Selatan telah dilakukan pemerintah, data yang didapat pengrajin tenun yang termotivasi untuk berdaya mengikuti pelatihan kerajinan tangan tenun songket. Desa Tanjung Dayang Utara pengrajin laki-laki sebanyak dua orang, perempuan dua puluh satu pengrajin dan Desa Tanjung Dayang Selatan pengrajin perempuan sebanyak delapan belas dan pengrajin laki-laki nol. Kegiatan pelatihan ini berupa bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi ketidakberdayaan TKW Purna setelah pulang dari luar negeri.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang pemberdayaan mantan TKW menjadi salah satu hal menarik yang dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman arah penelitian terlebih terhadap kaum perempuan mantan pekerja Buruh Migran (TKW Purna) untuk kembali berdaya dalam kondisi yang tidak mampu selama hidup di Desa dan melakukan penelitian sejauh mana pengembangan pemberdayaan TKW Purna yang dilakukan BNP2TKI melalui Kerajinan tangan Tenun Songket yang ada di Desa untuk menjadikan TKW Purna yang kreatif dan produktif melalui suatu pelatihan kerajinan tangan tenun songket di Desa Tanjung Dayang Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Perangkat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam perspektif pembangunan ini di sadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam upaya dalam meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmateri, sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat di artikan sebagai kegiatan pembantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang memiliki dengan menransfer daya diri lingkungan (Alfitri, 2011; Mardikanto & Soebiato, 2013).

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai *Power* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan mencakup enam hal berikut:

1. *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus menerus dampaknya dapat dilihat.
2. *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan.
3. *Self development and coordination*. Artinya memdorong agar mampu

- melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
4. *Self evaluation*. Pemberdayaaan harus mampu mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas
5. *Problem solving*. Pemberdayaan harus mampu memberikan arti terjadinya, pemecahan masalah yang di rasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
6. *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Alfitri, 2011).

Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana perangkat desa dilibatkan dalam proses pembangunan yang ada di desa, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan tersebut oleh masyarakat. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya *power* yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Noor, 2011; Widodo, 2018).

Pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes di kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, memahammi teknologi yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan perangkat desa juga dapat memperbaiki sistem pemerintahan

yang selama ini pelaporan keuangan masih menggunakan manual sedangkan sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih dan tentunya juga mempermudah sistem pemerintahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelatihan Aplikasi Siskeudes

Faktor penghambat dari pihak BPKP sendiri ada beberapa aspek diantaranya : Dana, Tempat, Waktu pelatihan dan peserta pelatihan yang masih Gaptex. Dana sendiri mereka bingung harus mendapatkannya dari mana sedangkan pihak Kabupaten tidak memberikan dana dan akhirnya sedikit terkendala. Melihat kendala ini akhirnya pihak BPKP memutuskan untuk setiap desa yang ada di Kabupaten memberikan sejumlah Dana Desa sebesar Rp.7.000.000 per desa untuk terlaksananya pelatihan Aplikasi Siskeudes ini. Dari faktor penghambat tempat dan waktu, pihak BPKP harus membagi waktu kerja mereka untuk melaksanakan pelatihan Aplikasi Siskeudes. Sedangkan tempat pelatihan pihak BPKP punya solusi untuk tempat pelatihan di sebuah Hotel yang ada di Kota Palembang, namun ternyata ada beberapa kendala dari yaitu besarnya Dana untuk biaya hotel. Akhirnya solusi terakhir tempat pelatihan di Aula gedung BPKP Palembang, hal ini untuk penghematan biaya sewa tempat.

Sedangkan faktor penghambat lainnya yaitu para peserta pelatihan yang dominan mayoritas masih banyak yang Gaptex namun ada sebagian yang sudah lebih dulu mengetahui dan paham tentang komputer. Peserta pelatihan semuanya berasal dari

desa dan tinggal di desa oleh karena itu, ada beberapa dari mereka yang masih sangat gagap teknologi bahkan untuk menghidupkan komputer saja mereka masih bertanya kepada panitia pelatihan. Melihat kondisi ini sungguh sangat miris, teknologi sudah ada dan canggih namun masyarakatnya yang masih belum bisa mengendalikan dengan baik, jangan sampai teknologi yang menguasai masyarakat tetapi sebaliknya masyarakatlah yang dapat mampu menguasai teknologi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan dilingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di pemerintah kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi kepala BPKP bidang penyelenggaraan keuangan daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta (Juardi et al., 2018).

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembangan aplikasi pilikasi. Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada

perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh pemerintah sehingga dapat diterapkan kepada seluruh desa yang ada pada pemerintahan yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan validasi dan Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP (Puspawijaya & Siregar, 2016).

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori dalam penelitian ini adalah teori dari Hogan (Kurniawan, 2015) yaitu menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experience*)
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadinya pemberdayaan dan ketidakberdayaan (*discus reasons for depowering empowerment*)
3. Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (*identify one problem of projek*)
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (*identify useful powerbased*)
5. Mengembangkan rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop of implementation plans*)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Nugrahani, 2014). Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kantor Badan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BPKP beserta Staf jajaran yang aktif serta kepala desa dan perangkat desa sebagai informan ahli untuk meminta umpan balik atas pernyataan informan.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui informan kunci dan informan pendukung (Creswell, 2009). Informan kunci berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari semua pihak BPKP yang terlibat dalam pelatihan yaitu Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Korwas BPKP, Kepala Kasubag dan Kepala Kepegawaian. Sedangkan informan pendukung berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Kepala Desa setempat, kepala dinas DPMDP3A serta perangkat desa yang mengikuti pemberdayaan melalui pelatihan aplikasi Siskeudes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa di laksanakan di kantor BPKP yang diikuti oleh seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Selatan. Setiap Kecamatan mempunyai beberapa desa, dan satu desa di wakili oleh salah satu perangkat desa yang akan diberikan pemberdayaan yaitu melalui pelatihan aplikasi Siskeudes. Di kabupaten Empat Lawang sendiri tercatat 146 desa yang sudah mengikuti pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa melalui

pelatihan aplikasi Siskeudes di kantor BPKP pada tanggal 17 Oktober 2017.

Pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan pemberdayaan dibagi dengan beberapa cara diantaranya: Aktor pelaksanaan pemberdayaan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena berdasarkan data tahun sebelumnya banyak sekali dana desa disalahgunakan oleh pemerintah desa setempat untuk kepentingan pribadi mengingat dana desa yang di berikan begitu besar yaitu satu desa satu milyar. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ke tidak transparansi keuangan desa serta penyelewengan dana desa, pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan menerapkan sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015 dan telah diresmikan oleh pihak BPKP pada awal tahun 2016. Pada tahun 2017, program Siskeudes ini telah disosialisasikan mulai dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai ke pemerintahan desa.

Selanjutnya program BPKP dalam melakukan pemberdayaan, Pemilihan instruktur seseorang sebagai pelatih

(Instruktur) harus didasarkan pada tingkat penguasaan materi atau disebut dengan tingkat ke profesionalan yang cukup tinggi. selanjutnya tujuan maupun manfaat pemberdayaan perangkat desa di antaranya: Meningkatkan ketrampilan (*skill*) masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup didalam bermasyarakat dan Dari sisi lembaga atau organisasi Meningkatkan produktivitas pegawai Pengisian data umum desa Untuk mengetahui seberapa jauh pengisian data umum desa untuk penyusunan anggaran APBDes. Tahap berikutnya sasaran pemberdayaan yaitu perangkat desa karena perangkat desa yang mempunyai tanggung jawab masalah administrasi keuangan desa untuk menjadi efektif dan efisien dan langkah langkah pemberdayaan. pelatihan selanjutnya persiapan pelatihan. Ketika semua sudah dipersiapkan semuanya selanjutnya yaitu pelatihan penyusunan Anggaran APBDes ke dalam

Aplikasi Siskeudes dan tentunya pelatihan ini mempunyai tujuan serta manfaat kedepanya bagi masyarakat desa terutama perangkat desa. Dalam pelatihan ini selain meningkatkan pemahaman atau skill masyarakat di bidang teknologi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari siklus teori Hogan akan tergambar mengapa Hogan meyakini bahwa program pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes yang terjadi Kabupaten Empat lawang pada tahun 2017 proses pemberdayaan tidak berhenti disuatu titik tertentu tetapi lebih merupakan

sebagai upaya kesinambungan untuk meningkatkan skill maupun daya dari perangkat desa. intinya pemberdayaan ini tidak bisa dilaksanakan hanya dalam sekali tetapi sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan secara terus menerus. Meskipun Hogan memfokuskan tulisanya pada pemberdayaan individu, tetapi model pemberdayaan yang bersifat *on going* proses tersebut juga dapat diterapkan pada level komunitas ataupun organisasi.

Dalam konteks kesejartraan masyarakat, upaya yang dijelaskan diatas tentunya terkait dengan upaya meningkatkan kesejahtraan dan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik yang tentunya harus mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor penyebab suatu masyarakat atau komunitas kurang berdaya. Dalam hal ini masyarakat miskin yang tidak mampu mengembangkan potensi mereka serta kekuatan yang mereka miliki untuk eksistensi masyarakat. Selain faktor kurangnya ekonomi masyarakat yang menjadi masyarakat tidak berdaya juga faktor dari pemerintah desa dengan masyarakatnya misalnya dalam hal fasilitasdesayang kurang memadai sehingga masyarakat tidak bisa menggasah potensi atau keahlian mereka. Tetapi setelah adanya pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak BPKP masyarakat menjadi sangat antusias dalam mengikuti pelatihan pemberdayaan ini dan juga pemberdayaan dialkukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan seperti yang diungkap teori pemberdayaan menurut Hogan.

Kondisi perangkat desa yang proses pemberdayaan sudah berlangsung secara berkesinambungan tidak hanya berhenti di pelatihan yang dilaksanakan oleh BPKP saja tetapi perangkat desa melanjutkan pelatihan tersebut di Kecamatan masing-masing yang sudah diberikan koordinator untuk membimbing pengoprasian aplikasi Siskeudes di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada baik *internal* maupun *eksternal* yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada terutama di administrasi keuangan desa. Dalam hal ini tergambar bahwa proses pemberdayaan merupakan *on going proses* bukan berarti meniadakan masalah akan tetapi pemberdayaan ini mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat bersifat proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Aplikasi Siskeudes

Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat ataupun kendala dalam proses pemberdayaan melalui pelatihan aplikasi Siskeudes oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang. Tentunya kendala ini menjadi penghambat berjalanya sebuah pelatihan atau suksesnya sebuah rencana. Kendala tersebut diantaranya faktor kendala dari pihak BPKP selaku Badan penyelenggara dan pelaksana

dan faktor kendala dari masyarakat atau perangkat desa yang mengikuti pelatihan aplikasi ini.

Kendala dari pihak Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Kota Palembang, yaitu dana, tempat dan waktu. Faktor penghambat dana sendiri mereka bingung harus mendapatkannya dari mana sedangkan pihak Kabupaten tidak memberikan dana dan akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat. Melihat kendala ini akhirnya pihak BPKP memutuskan untuk setiap desa yang ada di Kabupaten memberikan sejumlah Dana Desa untuk terlaksananya pelatihan Aplikasi Siskeudes ini. Sedangkan tempat pelatihan pihak BPKP punya solusi untuk tempat pelatihan di sebuah hotel yang ada di Kota Palembang, namun ternyata ada beberapa kendala dari yaitu besarnya Dana untuk biaya hotel. Akhirnya solusi terakhir tempat pelatihan di Aula gedung BPKP Palembang, hal ini untuk penghematan biaya sewa tempat.

Lalu kendala dari pemerintah desa (kepala desa) dan perangkat desa (peserta pelatihan), yaitu kurangnya sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam pemberdayaan karena sarana dan prasarana masih sangat minim sehingga tidak memungkinkan berjalanya suatu proses pemberdayaan. Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur desa sehingga masih kurangnya kemampuan untuk membimbing masyarakat lain untuk maju. Keterbatasan anggaran biaya untuk Bimtek atau pelatihan masih menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan ini. Lemahnya koordinasi

antar sektor atau lemahnya koordinasi dari pihak pemerintah desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang sedangkan partisipasi merupakan fondasi utama dalam menyukseskan program pemberdayaan. Kemampuan sumber daya manusia ditingkat desa masih terbatas ini merupakan kendala terbesar dalam pemberdayaan. Kemampuan Sumber Daya Manusia di tingkat desa yang masih terbatas sehingga dampak yang ditimbulkan asih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam proses pemberdayaan melalui pelatihan aplikasi Siskeudes oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang. Tentunya faktor pendukung menjadi ini menjadi sukses berjalanya sebuah pelatihan atau susksenya sebuah rencana. Faktor pendukung tersebut diantaranya faktor pendukung dari pihak BPKP selaku Badan penyelenggara dan pelaksana dan faktor pendukung dari masyarakat atau perangkat desa yang mengikuti pelatihan aplikasi ini.

Adapun faktor pendukung dari pihak Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Kota Palembang, yaitu Pelatih yang berpengalaman dan ulet. Keuletan pelatih menjadi faktor yang sangat penting karena peran seseorang pelatih dalam pelatihan sangat diutamakan, Antusiasme dan semangat yang tinggi ini muncul karena beberapa faktor yang menjadi motivasi mereka mengikuti

pelatihan aplikasi Siskeudes antara lain untuk memperbaiki ekonomi keluarga, agar memiliki keahlian dalam bidang teknologi sebagai bekal hidup, sebagai bekal untuk mencari pekerjaan atau perekonomian yang layak, Adanya kerjasama (kooperatif) antara pelatih dan peserta pelatihan yang baik, dan ketersediaan bahan dan alat, beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelatihan aplikasi ini antara lain laptop, mikropon, sound sistem, infokus, kursi, meja, dan bahan ATK lainnya. Pemberian uang transport bagi peserta untuk menjadikan motivasi tersendiri bagi mereka dan memberikan tanggung jawab bagi para peserta.

Lalu faktor pendukung dari pemerintah desa (kepala desa) dan perangkat desa (peserta pelatihan), yaitu Tersedianya tenaga instruktur atau pelatih yang siap membantu menyelesaikan pelatihan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di kantor BPKP Kota Palembang beberapa periode yang lalu, dan dengan adanya pelatihan aplikasi, Siskeudes ini yang mana pelaporan keuangan desa masih manual dan pihak BPKP maupun dari pemerintah desa harus turun lapangan langsung untuk melihat kondisi keuangan desa dan sarana prasarana yang ada di desa maupun pembangunan infrastruktur desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
 BPS Ogan Ilir. (2015). *Ogan Ilir Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik.
 Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif*,

Julius El Roy Marpaung, Dyah Hapsari, Vieronica Varbi Sununianti Pemberdayaan TKW Purna Melalui Program Kewirausahaan Kerajinan Tangan Tenun Songket Di Desa Tanjung Dayang Selatan Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.

- Disnakertrans Ogan Ilir. (2015). *Disnakertrans Tahun 2015*. Disnakertrans OI.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1), 84–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v4i1.5159>
- Kurniawan, D. A. (2015). Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 3(4), 1–17. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/11652>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mochklas, M., & Hariri, A. (2019). Pemberdayaan Purna TKW (Tenaga Kerja Wanita) Kecamatan Solokuro, Lamongan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 475–482. <https://doi.org/10.30653/002.201944.231>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Chakra Books.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem_Keuangan_Desa_2016_.pdf
- Samputri, S. K., & Sakti, H. (2015). Dukungan Sosial dan Subjective Well Being Pada Tenaga Kerja Wanita PT. Arni Family Ungaran. *Jurnal Empati*,

- 4(4), 208–216.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/14321>
- Universitas Stekom. (2022). *Ensiklopedia Dunia: Tanjung Dayang Selatan, Indralaya Selatan, Ogan Ilir*. P2k.Stekom.ac.id.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tanjung_Dayang_Selatan,_Indralaya_Selatan,_Ogan_Iilir
- Widodo, F. (2018). Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *JPPM: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 108–121.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/15932>
- Wulandari, I., Haryono, B., & Budiati, A. C. (2018). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Eks Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 85–94.
<https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18154>